

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan baik nasional maupun daerah. BPKP juga merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mengurangi dan mengendalikan risiko korupsi di Indonesia. Untuk mendukung peran tersebut, BPKP mengeluarkan produk pengukuran risiko korupsi yang disebut Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK).

IEPK adalah kerangka pengukuran dan penilaian kemajuan upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari komponen-komponen pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengendalian risiko korupsi di suatu kementerian/lembaga. Data IEPK bersumber dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan penilaian terhadap pihak internal lembaga yang bersangkutan sebagai responden. Serta data revidu pustaka dan hasil asesmen terkait sebagai data tambahan/pendukung.

Sasaran pengukuran dari IEPK adalah organisasi yang merupakan unit kerja pemerintah seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, Kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya serta berada dalam wilayah kerja BPKP. Setiap Kementerian/Lembaga yang menjadi objek penelitian dilakukan pengukuran yang berlandaskan kepada komponen tiga pilar penilaian.

Hasil pengukuran IEPK berupa skor dengan rentang 1 sampai 10 yang menunjukkan kondisi pengendalian risiko korupsi suatu kementerian/lembaga tidak dikelola sama sekali hingga kondisi pengendalian risiko korupsi dapat ditangani dengan sangat baik.

Penerapan IEPK bertujuan agar dapat menjadi basis data perbaikan tata kelola dan menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian upaya pencegahan korupsi. IEPK diharapkan dapat menjadi sistem yang terintegritas yang dapat meminimalisir risiko korupsi dan sebagai sistem deteksi korupsi. Serta dapat memperkuat strategi pengawasan dan pendisiplinan penyelenggaraan pemerintah agar bekerja secara jujur dan bersih.

5.2 Saran

Corruption Perception Indeks(CPI) Indonesia 2020 mengalami penurunan skor dari 40/100 menjadi 37/100 yang membuat Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Indonesia masih jauh dari bersih dan bebas korupsi. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai aspek pemerintahan. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) dapat menjadi strategi pengendalian risiko korupsi di Indonesia karena melakukan pengukuran di sendi-sendi pemerintahan.

Namun sebelum penerapan IEPK dilaksanakan, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada penilai dan akademisi secara berkala agar terwujud pemahaman yang kompleks. Serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada setiap

lembaga yang menjadi objek pengukuran. Konsep dan pedoman IEPK harus terus dilakukan perbaikan sehingga terbentuklah sistem yang terintegrasi dan dapat diperoleh skor yang lebih akurat. Perolehan skor dan pemeringkatan akan meningkatkan semangat dan sikap disiplin penyelenggara pemerintah untuk terus lebih baik lagi.

